

Lampiran :

Jadi Sasaran Kemarahan Pejabat Sekolah Favorit yang "Tak Terima" Anak Pejabat

Semarang, JP-

Sistem penerimaan siswa baru (PSB) yang diterapkan Kanwil Depdikbud Jateng banyak dikukuhkan oleh warga masyarakat. Pasalnya, Kakanwil membuat larangan tegas kepada kepala sekolah agar tidak menerima siswa baru tanpa melalui prosedur yang ditetapkan. Hal itu menyebabkan banyak anak pejabat dan tokoh masyarakat yang tidak bisa masuk sekolah favorit yang diinginkan. "Akibat kebijakan itu, kami yang menjadi sasaran kemarahan para pejabat yang anaknya tidak bisa masuk sekolah yang diinginkan," ujar seorang pengurus BP3 sebuah SMA Negeri Semarang kemarin.

"Banyak anak pejabat dan tokoh masyarakat yang tidak diterima di sekolah ini karena tidak memenuhi syarat. Pada tahun-tahun sebelumnya, mereka bisa diterima melalui dispensasi khusus. Tetapi tahun ini aturan itu dihapus," dia menambahkan sambil minta agar namanya tidak disebutkan.

Menjelang PSB tahun ini, Kakanwil Depdikbud Jateng mengeluarkan surat edaran yang disebut buku hijau mengenai sistem penerimaan siswa baru. Sebelumnya, untuk menampung anak para pejabat atau tokoh masyarakat, tiap sekolah membuat program khusus yang disebut bina lingkungan (Bilung). Anak pejabat atau tokoh masyarakat yang ingin

ditampung melalui Bilung, kendati tidak memenuhi syarat.

Tiap sekolah membuat aturan PSB disesuaikan dengan kemampuan. Misalnya, untuk sekolah favorit seperti SMA 3 Semarang, bisa menerima siswa dengan NEM (Nilai Ebtanas Murni) minimal 40. Sedangkan SMA 1 menentukan NEM minimal 45. Dua sekolah ini merupakan sekolah negeri terbaik di Semarang, sehingga banyak diminati anak pejabat.

Beberapa putra pejabat yang gagal masuk pada dua sekolah favorit ini lantaran NEM nya lebih rendah. "Sebelumnya, mereka ini bisa diterima melalui Bilung, tapi tahun ini tidak bisa sehingga banyak yang marah-marah," tambah dia.

Meskipun demikian, Kakanwil Depdikbud Jateng masih memberikan dispensasi kepada siswa yang berprestasi. Bagi yang berprestasi ditingkat II, bisa mendapat keringanan satu angka dari NEM minimal. Prestasi tingkat I, mendapat keringanan dua angka dan tingkat nasional mendapat keringanan empat angka.

Sampai saat ini belum jelas alasan Kakanwil Depdikbud Jateng menghapus Bilung ini, namun penghapusan ini nampaknya ingin meningkatkan peranan sekolah swasta. Dalam dengar pendapat dengan komisi E DPRD Jateng beberapa waktu lalu, Kakanwil Depdikbud Jateng Drs M Nasrun me-

ngatakan niatnya untuk menghapus Bilung. Penghapusan ini dimaksudkan untuk menghilangkan praktik percobaan dalam PSB.

Sekretaris komisi E DPRD Jateng Soesilo SH yang ditemui terpisah mengatakan, pihaknya bisa menerima alasan yang disampaikan oleh Kakanwil Depdikbud Jateng. Selain untuk menertibkan PSB, penghapusan ini dimaksudkan untuk pemerataan pendidikan. "Memang ada konsekuensi yang harus diterima, misalnya menolak anak pejabat, tapi secara keseluruhan kami mendukung langkah ini," ujar dia yang juga anggota FKPD.

Menurut Soesilo, secara umum kebijakan Kanwil Depdikbud Jateng ini bertujuan untuk melancarkan roda pendidikan yang sehat. Sekolah swasta yang selama ini kesulitan mendapat siswa yang berbobot, dengan kebijakan ini bisa ditolong. Untuk sekolah negeri tertentu, NEM minimalnya memang dinaikkan agar bisa dimasuki siswa yang memenuhi syarat.

Sedangkan yang memiliki NEM dibawahnya, bisa masuk sekolah negeri lainnya, atau sekolah swasta. "Saya lihat tujuan ini positif agar sekolah swasta bisa lebih berperan dengan jalan lebih banyak melibatkan mereka. Bagaimanapun juga peranan sekolah swasta itu harus diakui dan diberi kesempatan untuk berkembang," paparnya. (nun)

JAWA POS, 1 Juli 1992

Lampiran :

Bupati Siap Habis-habisan Lawan Hardi

Sukoharjo, JP.-

Bupati Sukoharjo, H Setyawan Sedono, bertekad untuk berjuang habis-habisan menghadapi gugatan yang diajukan Hardi Subroto, salah seorang warganya yang *mbalelo*. Ini dilakukan karena bupati merasa telah melakukan langkah yang tepat dan adil sebelum melakukan pengusuran terhadap rumah warganya yang terkena proyek jalur lambat Solo-Yogyakarta itu.

"Apa yang kami lakukan bukan semata-mata untuk kepentingan pemda. Tapi untuk orang banyak. Lagi pula, kami telah menawarkan ganti rugi yang cukup dan melakukan berbagai langkah pendekatan sebelum melakukan pembongkaran itu. Yang jelas, kami tidak mungkin menambah ganti rugi lagi, karena hal itu menimbulkan ketidakadilan bagi warga yang lain," kata bupati saat dihubungi *Jawa Pos* kemarin.

Tekad keras yang ditunjukkan Bupati Setyawan ini ternyata juga mendapat dukungan dari kalangan muspida lainnya. Bahkan, Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Suhartono SH secara spontan menyatakan dirinya siap untuk menjadi kuasa hukum bupati. Karena itu, untuk menghadapi gugatan Hardi dalam sidang yang mulai berlangsung pada 5 Juli

ngaku siap.

Bupati Setyawan juga menilai, langkah yang diambil Hardi Subroto untuk menggugat dia dan Bina Marga setempat merupakan cara yang terbaik. "Ini merupakan langkah terakhir yang paling tepat. Apalagi, upaya penyelesaian yang kami lakukan selama ini, khususnya dengan Pak Hardi, selalu menemui jalan buntu. Tapi melalui jalur hukum, kami harapkan persoalannya menjadi jelas dan tuntas," ujar dia.

Yang jelas, lanjut Setyawan, pihaknya berjanji untuk patuh pada putusan pengadilan. Termasuk jika pihak pemda setempat dianggap bersalah melakukan pembongkaran secara paksa terhadap rumah milik Hardi Subroto. "Kalau memang tindakan kami dianggap salah, kami siap untuk memberi ganti rugi sesuai putusan pengadilan," tutur dia.

Is juga mengungkapkan, pembongkaran paksa yang dilakukan terhadap rumah yang terletak di jalur utama yang menghubungkan Solo-Yogyakarta itu sebenarnya juga tidak dikehendaki oleh pemda setempat. Namun karena berbagai upaya untuk *merembug* pihak pemilik rumah tidak pernah membawa hasil, maka tindakan itu akhirnya dilakukan juga. "Kami punya banyak pertimbangan untuk melakukan pembongkaran

diantaranya karena proyek jalan yang melibatkan beberapa daerah tingkat dua itu merupakan proyek untuk kepentingan nasional. Disamping itu, pelaksanaan proyek yang merupakan program dari pusat itu dilakukan untuk keamanan dan ketertiban para pemakai jalan khususnya mereka yang menggunakan kendaraan kecil maupun tradisional seperti becak, sepeda, andong dan sebagainya.

Tanpa ada jalur lambat yang dibuat khusus untuk mereka, keselamatan dan keamanan para pengendara kendaraan itu kurang terjamin. Karena harus bersaing dengan kendaraan lain yang lebih besar dan lebih kencang seperti bus, truk, mobil dan sebagainya. Selain itu, dengan adanya jalur lambat ini maka arus lalu lintas di jalan ini menjadi bertambah lancar," tutur dia.

Dan pertimbangan lain yang paling utama, lanjut Setyawan, karena prosentase warga yang *mbalelo* dengan jumlah warga yang terkena pengusuran dinilai sangat kecil. Khususnya untuk desa Tempel yang hingga kini tinggal Hardi Subroto saja yang belum bersedia merelakan tanahnya. "Dari sekitar 714 kepala keluarga yang terkena proyek ini, ternyata masih ada enam orang yang *mbalelo*. Yakni Hardi Subroto dan lima warga lainnya di

JAWA POS, 6 Juli 1992

Surat Sakti Bingungkan Kepala Sekolah

Hari Ini Pengumuman Penerimaan Siswa Baru SMA

Surabaya, JP.-

Pengumuman penerimaan siswa baru SMA serentak dilaksanakan hari ini. Menurut Drs Bambang Soemarjono, Kahumas Depdikbud Jatim, pengumuman itu dapat dilihat di setiap subrayon pada pukul 10.00-12.00.

Pengumuman ini memang menebarkan para orang tua, karena jika tidak diterima di SMA negeri, harus bersiap-siap berebut kursi di SMA swasta yang baik.

Dari pantauan *Jawa Pos* sampai kemarin siang, rapat pengumuman penerimaan siswa baru SMA oleh tim penerimaan siswa baru setiap subrayon masih berlangsung. "Karena itu, kami belum tahu berapa NEM terendah di subrayon 02, termasuk di SMAN 5

untuk tahun ini," ujar seorang guru di SMAN 5 Surabaya.

Menurut kepala SMA negeri 9 beberapa waktu lalu, jumlah pendaftar yang mengembalikan formulir di subrayon 02—SMAN 6, 7, dan 9—tahun ini berjumlah 1.100. Sedangkan formulir yang terjual ada 1.400. "Pada pendaftaran lalu banyak formulir yang sudah dikembalikan ke subrayon 02 dicabut lagi. Alasannya, NEM yang mendaftar di subrayon ini tinggi," jelas kepala SMAN 9.

Menurut dia, untuk memperkirakan bagaimana penerimaan siswa baru saat ini dibandingkan tahun lalu cukup sulit. Pengalaman tahun lalu, kata dia, SMAN 9 termasuk subrayon SMAN 1. Pada waktu itu, jumlah pendaftar-

nya sangat banyak, hingga 2.350 dan diterima 1.590. "Padahal NEM terendahnya mencapai 44,85," katanya.

Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan pendaftar di SMAN 9, karena pergantian *gandengan*. "Tahun ini kan ada SMA favorit. Para orang tua khawatir kalau ada SMA favoritnya, pasti NEM-nya tinggi," jelasnya. Tetapi, lanjut dia, penerimaan siswa baru belum dapat dijelaskan hingga 6 Juli (hari ini).

Sementara itu, berkaitan dengan masalah penerimaan murid baru, ada beberapa kepala SMA negeri yang mengaku bingung karena ada memo-memo sakti dari para pejabat Kanwil Depdikbud Jatim. "Memang dari Kakanwil

ada ketentuan peniadaan bina lingkungan yang menyatakan tidak ada keistimewaan untuk keluarga pejabat, kepala sekolah maupun guru. Tetapi, *kok* masih ada surat sakti dari pejabat Kanwil Depdikbud," ujar seorang Kepala SMAN.

Munculnya surat memo untuk pendaftaran sekolah ini, kata dia, menjadi dilema yang sulit bagi sekolah. Di satu pihak ketentuan menganjurkan untuk dipatuhi, di pihak lain kepala sekolah merasa ditodong dengan adanya memo dari pejabat kanwil itu.

Meaki demikian, kata dia, sebenarnya, para kepala sekolah mengaku ragu dengan koalisi memo untuk menerima siswa-siswa tertentu ke SMA negeri itu. (end)

JAWA POS, 6 Juli 1992

Refleksi Pemilihan Gubernur Jatim.

SEPERTI diduga sebelumnya, Mayjen (Purn.) Basofi Soedirman memperoleh suara terbanyak (84 atau 83,8%) dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Sejak awal, "penyanyi" kelahiran Bojonegoro ini diunggulkan. Kecuali ia telah memperoleh restu dari pusat, juga banyak memperoleh dukungan dari bawah, sebagaimana terlihat dari surat-surat dukungan yang sampai di meja para wakil rakyat. Dan seperti diduga pula, Prof. Dr Marsotio dan R. Abdul Azis hanya memperoleh suara luberan saja, masing-masing sepuluh suara dan lima suara.

"Tungau begitu hampr bisa dipastikan, Basofi akan menggantikan Gubernur Soelara. Memang, ia masih membutuhkan penetapan presiden, yang memiliki "hak prerogratif" dalam menetapkan gubernur. Tapi, rasanya tidak ada seorang pun yang berpikiran kalau presiden akan menolaknya. Kasus pemilihan gubernur Riau pada tahun 1983 sulit terulang lagi di sini. Ketika itu, si kuda hitam Ismail Suko tiba-tiba memperoleh suara lebih tinggi dari calon lain yang diroset, yakni almarhum Imam Munnandar. Sejumlah wakil rakyat "mbalelo" terhadap skenario yang diepakati sebelumnya. Walhasil, si kuda hitam dipaksa cukup hanya bisa menikmati sebagai cagub dengan perolehan suara terbanyak saja. Yang ditetapkan menjadi gubernur tetapih calon yang diunggulkan.

Terhadap pemilihan gubernur yang berlangsung selasa, 6 Juli 1993, tempo hari, ada sesuatu yang patut kita renungkan bersama, yang hasilnya bisa kita pakai sebagai salah satu bahan di dalam mengembangkan demokrasi di negeri ini, terutama sekali di dalam pemilihan gubernur. Sesuatu itu, di antaranya adalah menyangkut proses pencalonan sam-

pai proses pemilihan.

Dibandingkan dengan daerah-daerah lain, proses pencalonan gubernur Jatim boleh dikatakan lancar-lancar saja. Kalau di daerah lain, para wakil rakyat harus *nintingi* sekian nama, kemudian dipilih lima nama di antaranya, di Jatim tidak begitu. DPRD I langsung menetapkan tiga nama calon dan langsung disetujui oleh Mendagri. Semuanya berlangsung secara "kekeluargaan" dan lancar-lancar saja. Tidak ada koributan. Kalaupun ada "protes" dari sejumlah kiai, karena nama yang diinginkan tidak dicalonkan, hanyalah riak-riuk kecil yang tak mengganggu suasana.

Kelancaran proses pencalonan itu tidak lepas dari model patronase di dalam pengambilan keputusan. Figur Mohammad Said, sebagai "the kings maker" relatif menentukan. Tokoh asal Lamongan ini memang flamboyan dalam soal otak-otak di dalam menetapkan siapa yang mesti menjadi cagub dan calon bupati/wali kota. Di jajaran pengambil keputusan di Jatim ia amat diacani, di samping karena memang paling senior.

Kehebatan Said di dalam pencalonan cagub terlihat bagaimana ia "mementahkan" nama-nama populer, yang sebelumnya disebut-sebut bakal diunggulkan. Tidak seperti di daerah-daerah lain, seperti DKI Jaya, Sumatera Utara, Aceh, dan beberapa daerah lainnya, di Jatim ditetapkan hanya ada satu nama yang betul-betul terjamin menjadi calon jadi, yakni Basofi Soedirman. Kalau pun kemudian muncul nama Marsotio dan R. Abdul Azis — yang dipandang memiliki reputasi seimbang — tak lebih sebagai pendamping belaka dan untuk memenuhi persyaratan legalitas, karena di dalam pencalonan gubernur harus ada tiga nama.

Model patronase itu kian terli-



hat ketika calon dari FKP didukung oleh fraksi-fraksi lain. Tidak seperti di Aceh yang diwarnai oleh perbedaan antara FKP dan FABRI, di Jatim berjalan amat harmonis. Sentralitas FKP nampak sekali. Bahkan, FPP dan FDI yang sebelumnya agot mencalonkan Gubernur Soelara dan R. Hartono, harus secara ikhlas mendukung calon FKP, tanpa diwarnai keberanian untuk memiliki calon alternatif.

Tentu saja faktor pusat amat menentukan. Figur Mohammad Said, dalam konteks ini, tak lepas dari kopangannya pusat. Leading-nya nama Basofi tidak lepas dari konsep pembagian kekuasaan dan penempatan figur-figur "berbobot". Basofi selama ini dilihat sudah banyak "mengalah". Lihat saja ketika ia mengundurkan diri pencalonan gubernur DKI. Dalam perspektif kekuasaan, mengedepannya nama Basofi, memang karena sudah "jatuhnya" harus demikian. Peran dominan dari pusat ini terlihat dari — konon — sibuknya Mohammad Said ke Jakarta untuk keperluan pencalonan gubernur.

Perspektif semacam itu kian terlihat pada proses pemilihan. Upaya untuk mengamankan Basofi betul-betul rapat. Ini terlihat dari komposisi perbandingan perolehan suara (Basofi= 84, Marsotio= 10, dan Azis= 6. Dugaan saya suara untuk Marsotio dan Azis "murni" datang dari FKP dan FABRI). Komposisi semacam ini memang terlihat amat tak seimbang. Tapi komposisi demikian inilah yang memungkinkan Basofi betul-betul aman. Hal ini di-

maksudkan untuk "mewaspadai" kalau-kalau FPP dan FDI "mbalelo". Jumlah suara dua fraksi ini tiga puluh tiga. Kalau suara FKP dan FABRI enam puluh enam — dibagi "seimbang", ada celah-celah bahaya. Bisa-bisa si kuda hitam akan muncul, dan kasus Riau atau Aceh boleh jadi akan terulang. Maka; demi keamanan, harus ada calon-calon yang dikurangkan, meminjam istilahnya Marsotio.

Dalam perspektif semacam itu pula, perbincangan tentang otonomi para wakil rakyat (termasuk fraksi) menjadi kurang relevan lagi. Patronase begitu kuat, sehingga masing-masing anggota tidak berhak secara leluasa di dalam menentukan pilihan. Di samping memang harus loyal terhadap fraksi, para anggota seperti ini tidak ingin berpredikat "mbalelo". Mereka harus bermain sebaik-baiknya, berdasarkan arahan-arahan "sang sutradara".

Model semacam itu pula yang membuat pemikiran Alvin Toffler tidak berlaku di sini. Seperti diketahui, ketika diperkenalkan di hadapan para tokoh masyarakat, Profesor Marsotio menyinggung pemikiran Toffler. Marsotio memang pengagum Toffler. Ada beberapa buku tulisan Toffler di rak bukunya, mulai dari *Future Shock* sampai *Power Shift*.

Menurut Toffler, ada tiga sumber kekuasaan, yang saling ia angasi, yakni *muscle (violence)*, *money (wealth)* dan *mind (knowledge)*. Dalam pandangan Marsotio, ketiga calon memiliki sumber-sumber kekuasaan sebagaimana disebutkan Toffler. Basofi memiliki *muscle*, Azis memiliki *money*, dan ia sendiri memiliki *mind*.

Saya tersenyum-senyum sambil berkata "hebat" ketika membaca ucapan Profesor Marsotio ini di surat kabar. Dalam ucapan semacam itu, terselip satu pandangan

Profesor Marsotio, bahwa dialah yang paling tepat untuk dipilih. Selain menguasai *knowledge* juga pernah memimpin universitas dan menjadi dubes. Masalahnya, dalam pandangan Toffler, belakangan terdapat pergeseran sumber-sumber kekuasaan. Kalau sebelumnya sumber kekuasaan *muscle* mendominasi dua sumber lain, kemudian dilanjutkan dengan dominasi *money* atas dua lainnya, maka di belakangan *mind* lah yang mendominasi, karena *muscle* dan *money* hanya menyokong saja. *Knowledge* telah banyak merubah tata dunia. Tidak hanya perubahan di bidang iptek, melainkan juga peta kekuasaan.

Ya, begitulah, berangkat dari para wakil rakyat belum membaca buku Toffler, *Power Shift* (semoga saya salah), sehingga tawaran Profesor Marsotio kurang diminati. Tapi, masalahnya tentu tidaklah demikian. Harus dipahami, real politik acapkali berbeda dengan teori (apalagi kalau diingat, teorinya Toffler sendiri memang kurang laku di kasanah intelektual internasional). Lebih-lebih kita sedang dihadapkan dengan panggung politik yang beratmosfir lain dengan negara-negara maju yang disinyalir Toffler.

Akhirulakam, saya ingin mengajak para pembaca budiman untuk berenung-renung. Apakah model pemilihan semacam di atas itu yang betul-betul ideal untuk negeri yang disemangati rasa harmoni ini? Apakah model demikian yang perlu dikembangkan, dan sudah demokratis? Apakah model semacam itu relevan dalam konteks jaman seperti sekarang ini? Mari kita renungkan bersama.

• Kacung Marjan, staf pengajar Fisip Universitas Airlangga dan penulis pada *Puskesmas Paramawidya*

Lampiran:

Ismail "Titipkan" Djoko ke Soewardi

Sebagai "Jagonya" untuk Jadi Ketua Golkar Jateng

Semarang, JP.-

Gubernur Jateng HM Ismail tetap pada pendiriannya untuk mendukung Djoko Moeljo SH, sebagai calon ketua DPD Golkar Jateng periode mendatang. Apalagi, dalam pertemuan tiga serangkai, Ismail, Djoko dan Mayjen Soewardi Kamis lalu, banyak disinggung masalah pencalonan ketua Golkar. Rupanya, Ismail menitipkan pesan kepada calon penggantinya itu, untuk tetap *ngelus-elus* jagonya.

"Memang, ketika itu kami bertiga bertemu dan membahas secara umum masalah pemilihan ketua Golkar Jateng yang akan datang. Sekaligus, dalam pertemuan itu juga disinggung mengenai beberapa persoalan yang mendasar untuk kemajuan Jateng secara umum," kata Djoko Moeljo kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin.

Seperti diberitakan, Kamis lalu Soewardi yang baru saja terpilih menjadi gubernur Jateng langsung menemui Ismail untuk membicarakan beberapa masalah. Djoko Moeljo secara khusus juga ikut dalam pertemuan dengan gubernur Jateng terpilih itu. Banyak kalangan pihak yang menduga pertemuan itu merupakan upaya

Ismail untuk "menitipkan" Djoko kepada Soewardi. "Kami bertiga memang membicarakan persiapan Musda itu," ungkapnya.

Nampaknya Ismail perlu membuat perincian sebelum mengakhiri jabatannya sebagai gubernur Jateng. Sebelumnya, dia ingin agar Musda Golkar diadakan sebelum 24 Agustus, ketika dia moenyorshkan jabatannya. Sampai saat ini, keinginan itu belum dijawab oleh DPP Golkar. Namun sebuah sumber di DPD Golkar Jateng mengatakan, kemungkinan Musda akan diadakan Septemberyang akan datang.

Dalam kesempatan pertemuan 2 tokoh teras di Jateng dengan calon kandidat gubernur Jateng itu, juga disinggung mengenai kepengurusan Golkar Jateng saat ini dan masa mendatang secara umum. Sehingga menghasilkan kesimpulan kecil bahwa perlu adanya penataan kembali kepengurusan Golkar Jateng, terutama dalam menghadapi berbagai masalah serius yang dihadapi Golkar. "Hal itu demi kepentingan dan kemajuan Golkar Jawa Tengah pada masa yang akan datang. Dan, juga menyangkut untuk kepentingan umum, tentunya."

Seperti diberitakan harian ini, Golkar Jateng yang akan mengadakan Musda, sudah diramaikan oleh munculnya balon (bakal calon) ketuanya. Yang terkuat dari beberapa calon yang diusulkan, nama Brigjen (Pur) Utoyo marul dan Djoko Moeljo bakal bersaing ketat. Karena masing-masing telah mendapat dukungan dari banyak kalangan. Terutama Djoko yang sekarang menjabat Kajati Jateng itu secara resmi telah didukung gubernur Ismail.

"Saya selaku ketua jalur B juga telah menyiapkan beberapa nama calon yang kami nilai pantas menduduki ketua Golkar Jateng. Salah seorang diantaranya adalah Pak Djoko Moeljo SH. Nama yang lain nanti kalau sudah dekat waktunya akan diumumkan kepada pers," kata Ismail kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Tidak hanya Ismail yang mendukung pencalonan Djoko itu, tetapi banyak kalangan menyebutkan Djoko memang pantas memimpin Golkar Jateng periode mendatang. Djoko juga menyambut dukungan untuk pencalonan dirinya dengan penuh optimisme dapat menduduki kursi ketua Golkar Jateng. (liq)

JAWA POS, 21 Juli 1992

Lampiran:

Proyek Perumahan Perlu Deregulasi

Besok Menpera Resmikan Perumahan Sidorahayu, Malang

Surabaya, JP.- Perumahan Sidorahayu Malang yang dibangun PT. Yasagriya Pemula, menurut rencana, besok akan diresmikan Menteri Negara Perumahan Rakyat Ir Akbar Tanjung. Inilah perumahan pertama yang dibangun setelah dibuatnya memorandum of understanding (MOU) antara Real Estate Indonesia (REI) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada 18 Juli 1993.

Selain meletakkan batu pertama di lokasi perumahan di Desa Sidorahayu, Wagir, Kabupaten Malang, menteri juga akan melakukan temu wicara dengan masyarakat desa binaan P2LDT. Setelah itu, menteri juga mengadakan pertemuan dengan bupati/walikota serta pengusaha REI se-Jatim di Regents Park Hotel. Pertemuan itu untuk membicarakan pembangunan perumahan sederhana dan sangat sederhana yang masih banyak menemui hambatan.

Perumahan Sidorahayu adalah perumahan sangat sederhana. Lokasinya berjarak enam kilometer dari Alun-Alun Kota Malang.

Menurut rencana, Yasagriya akan membangun 1.400 unit rumah tipe 21 dan 36 di atas tanah 15 hektare di desa tersebut. Tahap pertama akan kami bangun 400 unit dan selesai tiga bulan mendatang," kata Dirut PT Yasagriya Pemula Ridwan Hidayat kepada Jawa Pos di kantornya kemarin.

Rumah tipe 21 dijual dengan harga Rp 4,6 juta dan tipe 36 Rp 6,4 juta. Kalau dibeli dengan kredit, uang mukanya sepuluh persen. Namun, khusus pegawai negeri golongan I dengan masa kerja 10 tahun dibebaskan membayar uang muka apabila membeli rumah tipe 21 dan golongan II dengan masa kerja 12 tahun bebas uang muka apabila membeli tipe 36.

Menurut rencana, Yasagriya juga akan membangun rumah yang sama di Gresik dan Tuban. Bahkan, tahun-tahun mendatang pembangunannya akan dilanjutkan di daerah-daerah lain di Jatim.

Ridwan yang juga sekretaris umum REI dan ketua Hipmi Jatim itu menunjuk adanya proses perizinan yang masih sulit. Biaya

pengurusan baik resmi maupun tidak resmi juga masih banyak. Pada hal, harga RSS sudah dipatok pemerintah dan tidak bisa dinaikkan lagi.

Ketentuan pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) juga dianggap masih menghambat RSS. Masalahnya, IMB harus diajukan per unit rumah yang akan dibangun. Pengajuan IMB ini selain dengan biaya, juga ada lampiran-lampiran yang jumlahnya juga banyak. Kalau kita membangun 1.000 unit, harus mengajukan IMB 1000 unit. Padahal, satu pengajuan paling tidak harus dilampiri empat gambar yang masing-masing harganya Rp 2.500. Belum lagi lampiran-lampiran lain yang harus ditandatangani lurah dan camat," katanya.

Retribusi IMB juga dinilai terlalu tinggi untuk RSS. Masalahnya, retribusi itu sama dengan perumahan yang lain. Padahal, harga RSS sendiri sudah dipatok 60 persen dari standar PU Cipta Karya. Karena itulah, Ridwan usul aturan-aturan yang mengenai rumah sangat sederhana dideregulasi. (hq)

JAWA POS, 19 November 1993

Pembebasan Tanah Driyorejo Terganjil oleh Pihak Ketiga

Kemarin Penyerahan Sebagian Ganti Rugi

Gresik, JP.-

Meskipun upaya pembebasan tanah di lokasi pembangunan Kota Baru Driyorejo sudah dipayakani semaksimal mungkin, namun sampai sekarang masih sekitar 719 hektare — dari 1000 hektare yang dibutuhkan — yang belum dibebaskan. Belum dibebaskannya tanah tersebut karena selain masih adanya pihak ketiga, masyarakat juga masih ada yang

padahal untuk pembebasan seluas 281 hektare yang dibagi dalam dua tahap itu, pihak Perum Perumahan sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp 7 miliar. Untuk tahap pertama pembebasan tanah seluas 203 hektare diperlukan biaya sebesar Rp 3,5 miliar. Sedangkan sisanya seluas 78 hektare juga menghamburkan biaya pembebasan sebesar Rp 3,5 miliar. Perbedaan harga itu karena ada perkembangan harga tanah, dari tahap pertama ke tahap ke dua," kata Ir HA Jasin Slawat, Kepala Perum Perumahan Cabang VI.

Karena itu, untuk menghindari pembengkakan biaya, menurut rencana pembangunan kota itu akan dilakukan secepat mungkin di atas tanah yang sudah dibebaskan. "Untuk sisa tanah yang belum dibebaskan, kami berusaha agar paling lambat bulan Maret tahun depan sudah bisa dibebaskan semua," tambahnya.

Upaya pembebasan tanah dari pihak ketiga yang selama ini dilakukan oleh Perum Perumahan Kota Baru Driyorejo melalui Panitia Driyorejo sebelumnya mengalami kesulitan. Hal itu ada kaitannya dengan pertemuan warga dengan pihak ketiga yang selama ini menguasasi surat-surat tanah milik warga. Kami harus menunggu empat bulan untuk bisa ketemu dengan pak Sastro," kata beberapa warga.

Sastro ini, beberapa waktu lalu dikatakan sebagai orang yang menguasasi surat-surat tanah milik warga. Dan akhirnya setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya Sastro bersedia melepas tanah warga yang dikuasainya. Namun itupun dengan

perjanjian ada beberapa persen dari ganti rugi yang harus diberikan kepada Sastro.

Dalam pembayaran ganti rugi kepada warga kemarin, terungkap bahwa Sastro bersedia melepas tanah yang pernah dibeli di bawah tangan itu dengan ketentuan bahwa pemilik pertama harus menyerahkan uang sebesar 12,5 persen dari jumlah yang diterima dari Perumahan. "Tupun setelah melalui perundingan yang alot, arwah arwah) dan sudah 50 persen," kata warga lainnya yang beberapa tahun lalu juga melepas tanahnya kepada Sastro.

Sastro yang juga menghadiri pembayaran ganti rugi kepada warga kemarin mengatakan rela melepas tanah warga karena tanah itu digunakan untuk pembangunan. "Demi pembangunan saya rela melepas tanah yang surat-suratnya ada pada saya," katanya.

Selain itu karena tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan orang banyak, maka dia bersedia melepasnya. (kur)

JAWA POS, 11 September 1993

Lampiran:

"Percepat Proses Perizinan"

Menpera Meletakkan Batu Pertama RSS di Wagir

Malang, JP

Upaya mengatasi kurangnya fasilitas rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah daerah (pemda) diminta untuk membantu mempercepat proses perizinan bagi para pengusaha atau investor yang hendak membangun rumah sangat sederhana (RSS). Penegasan itu disampaikan Menteri Perumahan Rakyat Ir Akbar Tanjung usai meletakkan batu pertama pembangunan RSS di Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, kemarin.

Menurut Akbar, selama ini "bantuan" yang diberikan pemerintah itu masih belum sepenuhnya. Sebagai contoh adalah IMB (izin mendirikan bangunan) yang sampai saat ini masih diberlakukan untuk masing-masing unit rumah, begitu juga prasarana jalan yang dibebankan kepada investor. "Ya kita akan mempolajari bagian-bagian mana yang bisa kita permudah atau peringkat. Dan biaya-biaya mana yang bisa kita kurangi," ujarnya.

RSS yang akan dibangun di desa Sidorahayu itu jumlah totalnya mencapai 1400 unit. Namun untuk tahap pertama baru akan dibangun 450 unit. Proyek ini merupakan proyek perdana dari PT Yasagriya Pemula.

Lokasi kompleks RSS di Sidorahayu itu akan dibangun di atas areal seluas 15 hektare. Namun tahap pertama itu sudah habis semua setelah kami buka pemasarannya sejak 1 hingga 8 Nopember lalu. 150 unit untuk pegawai swasta sedangkan yang 300 disediakan untuk pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda Kabupaten dan Kotamadya Malang," kata Direktur PT Yasagriya Pemula Ir H.M Ridwan Hidayat.

Lebih jauh Menpera mengatakan, saat ini pemerintah sedang memikirkan bagaimana caranya agar investor bisa memperoleh IMB secara kolektif. Untuk itu,

rang adalah berusaha mempercepat prosedurnya, katanya.

Sedangkan untuk prasarana jalan kemarin Menpera juga sudah membicarakannya dengan Bupati Malang, Drs. H. Abdul Hamid Mahmud agar Pemda Kabupaten Malang membantu. Sebab pengadaan RSS ini adalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Akbar Tanjung.

Kalaupun pembangunan prasarana jalan itu dibebankan kepada investor, least dia tentunya tidak mungkin. Karena semua pihak mengetahui bahwa *profit marketing* proyek RSS sangat kecil. "Kalau kita bebankan lagi kepada mereka sudah pasti mereka tidak akan mendapatkan keuntungan. Kalau sampai itu yang terjadi, ya sulit bagi kita untuk mendorong investor lain untuk membangun RSS," kata Menpera.

Tetapi, lanjutnya, bukan berarti pemerintah lantas memanjakan

investor itu. "Kalau misalnya ada investor yang sudah dibantu dan ternyata dalam pelaksanaannya tidak memenuhi persyaratan, ya tidak ada salahnya bila pemda lantas menghambat pengurusan segala bentuk perizinannya," ujarnya.

Selain itu, Menpera juga mengatakan, kemampuan penyediaan perumahan dan pemukiman untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat saat ini masih berada jauh di bawah kemampuan sektor lain. Hal itu antara lain disebabkan oleh peredaran lahan yang semakin terbatas, harga bahan bangunan semakin mahal serta pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi, dan masih banyak faktor lainnya.

Pemerintah untuk mengatasi hal itu antara lain akan membangun sedikitnya 600.000 unit rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. (wir/hq)

JAWA POS, 21 Nopember 1993

Lampiran:

Salahi Aturan, Jual Tanah KSB

Malang, JP. DPRD Kodya Malang meminta eksekutif agar segera melakukan tindakan tegas dan pengawasan secara ketat terhadap para developer yang menjual tanah kapling siap bangun (KSB). Termasuk developer yang tidak tidak memenuh ketentuan memberikan *open space*.

"Kami sudah melakukan pemantauan di beberapa perumahan yang dibangun swasta. Ternyata apa yang seharusnya tidak dilakukan, kini telah menjadi trend. Yaitu menjual KSB. Dengan begitu, developer bisa diartikan menyalahi aturan dan eksekutif perlu memberikan sanksi," tegas R Moelyono SH, Ketua Komisi D DPRD Kodya Malang kepada Jawa Pos, kemarin.

Sesuai ketentuan, menurut Moelyono, memang hanya Perumahan dan Papan Sejahterah yang diperbolehkan menjual KSB. Namun belakangan, developer swasta non Papan Sejahterah dan Perumahan, ikut-ikutan menjual KSB. Disebutkan, kini banyak developer yang sudah mulai menyimpang dari *site plan* sebagai syarat permohonan perizinannya.

"Kalau itu dibiarkan, berarti perusahaan perumahan tidak lagi memfungsikan sebagai sebagaimana mestinya. Tetapi bisa diartikan menjadi calo tanah, sebab mereka menjual tanah kapling setelah membebaskan tanah," jelasnya.

Setelah melakukan beberapa kali peninjauan ke beberapa developer, Moelyono mengumpulkan data, bahwa usaha para developer seperti itu umumnya karena terburu-buru. Sehingga

"terpaksa" tidak menjual rumah, tetapi "hanya" bisa menjual tanah KSB.

Kondisi seperti ini jelas menyalahi aturan. Sebab izin yang diberikan untuk pembebasan tanah telah mencantumkan kegunaannya. Dan tidak dibenarkan kalau menjual KSB. Tetapi sekarang ini malah hampir semua developer melakukannya. Bahkan salah satu investor di proyek Gunung Buring pun ada yang merencanakan hal yang sama," jelasnya.

Moelyono yang juga anggota PKP ini memberikan masukan kepada eksekutif agar penjualan KSB diberikan pencakalan-pencakalan dari pemegakan, kewibawaan pemerintah. "Kami rasa, eksekutif bisa tidak mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) nya. Ini penting lantaran menyangkut perencanaan dan penataan pertanahan, khususnya di lingkungan perumahan," ujarnya.

Untuk mengetahui bahwa di lingkungan perumahan yang dibangun developer ada penjualan KSB, disebutkan Moelyono tidak lah sulit. Biasanya, penjualan seperti itu akan disertai permohonan IMB secara tersendiri. Dari sinilah santinya DPUD Kota, maupun bagian pembangunannya bisa melakukan pencakalan dengan tidak mengeluarkan IMB.

"Karena IMB perumahan biasanya sudah menjadi satu dengan izin konstruksi secara menyeluruh," katanya.

Senada dengan Moelyono, Ketua DPRD Kodya Malang Mas Soemarto juga memberikan pernyataan tegas. Bukan saja men-

yangkut KSB. Tetapi juga yang berkaitan dengan pemberian fasilitas umum atau ruang terbuka di lingkungan perumahan. "Sekarang ini sudah bukan rahasia lagi kalau apa yang direncanakan dalam *site plan* perumahan ketika mengajukan izin tidak lagi dipenuhi. Setelah perumahan dibangun, ruang terbuka bebas yang semestinya bisa digunakan penghuni untuk sarana pendukung perumahan justru dibangun rumah atau dikapling," jelasnya.

Dengan tegas juga Mas Soemarto minta eksekutif melakukan penelitian ulang terhadap seluruh *site plan* developer yang telah diberikan izin. "Nyatanya, sekarang ini, banyak developer yang hanya menajikan fasilitas umum saja. Tapi fasilitas yang dijanjikan itu tidak ada wujudnya," jelasnya.

Mas Soemarto tidak menyalahkan calon penghuni perumahan, ada yang menuntut janji developer khususnya terhadap penyediaan lahan untuk kepentingan umum, utamanya pemakaman umum.

Selain itu, Mas Soemarto juga menyoroti secara tajam adanya developer yang menutup kawasan perumahan yang dibangunnya untuk umum. Ditunjukkan seperti pembangunan perumahan mewah di Taman Indrakila.

"Hal seperti itu yang saya tidak setuju. Apa mereka ingin membuat masyarakat eksklusif? Kalau memang di tempat itu baru tidak bisa dilakukan itu. Fortal harus dibuka," tegasnya. (JU)

JAWA POS, 30 Nopember 1993

Lampiran :

Delapan RSS Ambruk Diguyur Hujan Lebat

Agustus Lalu Diresmikan Wapres Try Sutrisno

Gresik, JP.

Delapan rumah sangat sederhana (RSS) di kompleks Perumahan Desa Kedayang, Kecamatan Kebomas, roboh, Minggu malam. Rumah yang Agustus lalu diresmikan Wapres Try Sutrisno itu roboh diduga karena pondasinya kurang kuat. Selain itu, tanah urukan yang digunakan sebagai landasan pondasi juga kurang padat.

Ambruknya delapan rumah di blok OC nomor 14 sampai 21 itu bermula ketika kota Gresik diguyur hujan cukup deras. Tidak itu saja, hujan yang turun sejak sore disertai angin kencang juga membuat kawasan RSS tersebut tergenang banjir karena saluran pematuan di tempat itu belum selesai seluruhnya.

Menurut beberapa orang yang dihubungi di kompleks perumahan sangat sederhana kemarin, rumah yang sudah siap huni itu ambruk pada tengah malam saat diguyur hujan. Sebelum ambruk, tembok rumah yang terbuat dari batako tersebut retak-retak dan posisinya miring dengan arah ke dalam. "Mungkin tanah urukannya kurang padat, sehingga saat

hujan turun, tanah itu memadat dan menarik pondasi hingga rumah itu roboh," katanya.

Rumah yang roboh, menurut dia, kemudian menarik bangunan rumah lain di sebelahnya, sehingga akhirnya delapan rumah roboh karena tertarik rumah lain yang roboh lebih dulu. RSS yang dibangun sebanyak 1.000 unit itu memang dibangun saling berhimpitan. Kalau satu rumah roboh, rumah lainnya akan tertarik. Robohnya rumah yang tertarik sampai roboh hanya sampai rumah nomor 13 di blok CC.

Rumah-rumah itu, menurut data yang dihimpun Jawa Pos, milik beberapa karyawan PT BHS Tex dan karyawan Pemda Gresik.

Mengetahui delapan rumah roboh sebelum diserahkan kepada pemiliknya, beberapa karyawan dari PT Dian Fortuna Erisindo yang menangani pembangunan rumah itu segera menghubungi kantor pusatnya di Surabaya. Tak lama kemudian, pimpinan perusahaan itu segera mengambil langkah pengamanan.

Delapan rumah yang roboh itu kemudian diratakan sekalian

dan dibangun lagi dengan rumah baru yang sejenis. Subkontraktor yang menangani pembangunan rumah tersebut, PT Tenaga Inti, saat ini sedang meratakan delapan rumah yang roboh tersebut dan segera membangun kembali rumah itu.

Tidak ada korban jiwa akibat robohnya delapan rumah di Desa Kedayang, Kecamatan Kebomas itu. Karena saat roboh, rumah itu belum disertahkan kepada pemiliknya yang sudah memesan lebih dulu. "Untungnya, tidak ada penghuninya. Kalau sudah diserahkan kepada penghuninya kemudian roboh, pasti akan menelan korban," kata beberapa orang.

Dari delapan rumah yang roboh tersebut, pihak kontraktor diduga menderita kerugian sekitar Rp 40 juta lebih. Pihak PT Dian Fortuna Erisindo yang dihubungi menyatakan, rumah yang belum diserahkan kepada penghuninya dan masih dalam tahap penyelesaian dan menjadi tanggung jawab kontraktor. Karena itu, pembangunan kembali rumah yang roboh itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor yang menangannya. (kur)

JAWA POS, 21 Desember 1993

Lampiran :

"Tinjau Ulang Semua RSS"

Djuhansah Soal Ambruknya Delapan RSS Kedunyang

Gresik, JP.

Bupati Gresik H Djuhansah meminta agar developer RSS meninjau kembali kondisi bangunan dan tanah rumah yang belum roboh di kompleks perumahan RSS di Desa Kedunyang. Hal itu dilakukan agar peristiwa yang menimpa delapan rumah yang roboh sebelumnya bisa diantisipasi.

"Dengan peninjauan kembali kekuatan tanah dan bangunan yang sudah berdiri, developer bisa melakukan tindakan pencegahan agar peristiwa robohnya rumah tidak terulang," katanya kepada *Jawa Pos* kemarin.

Selain itu, bupati juga akan melihat secara langsung kondisi rumah lainnya yang belum roboh agar segera diketahui kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi dan segera diatasi developer. "Saya sendiri heran, padahal tanah itu sudah cukup kuat karena dulunya tanah itu kondisinya baik," tambahnya.

Pihak developer PT Dian Fertuna Erisindo kemarin tidak berhasil dihubungi. Tetapi, informasi yang dihimpun *Jawa Pos* menyebutkan, selama rumah belum diserahkan kepada pemiliknya, segala kerusakan akan

menjadi tanggung jawab developer. Selain itu, pemilik juga mendapat garansi setahun sejak rumah itu diserahkan kepada pemiliknya.

Ribohnya delapan RSS yang baru dibangun kemarin sedikit banyak membuat pemilik rumah lainnya khawatir kalau-kalau peristiwa itu menimpa rumah mereka. Namun, sejauh itu para pemilik rumah sangat sederhana yang dihubungi *Jawa Pos* belum mengajukan tuntutan jaminan keamanan atas rumah yang mereka beli.

Suyono, karyawan Pemda Gresik bagian protokol yang membeli rumah di kompleks mengatakan akan melihat dulu kondisi rumah yang dibelinya. "Dalam perjanjian jual beli disebutkan bahwa ada garansi selama setahun untuk rumah tersebut selama rumah itu belum diubah bentuknya," katanya.

Karena itu, dia akan melihat kondisi rumah lebih dulu sebelum menempatinya. "Kalau lepas dari satu tahun rumah itu roboh, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah lepas dari masa garansi. Tetapi, saya rasa pemda tentu tidak akan diam kalau rumah itu nanti roboh setelah satu

tahun," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD dari FPP, H.M.Sai Musa, mengatakan bahwa para pemilik rumah yang dibangun di kompleks perumahan sangat sederhana berhak menuntut jaminan keselamatan atas rumahnya. "Karena kalau rumah itu roboh akibat konstruksi yang *awut-awutan*, tentunya juga akan mengakibatkan bencana bagi penghuninya," katanya.

Untungnya, saat roboh rumah-rumah itu belum diserahkan kepada pemiliknya. "Bayangkan kalau rumah itu sudah ditempati lalu roboh, akan bisa timbul korban. Kalau sudah begitu, siapa yang bertanggung jawab," tambahnya.

Pertanya jaminan keselamatan dan keamanan dari rumah-rumah itu agar pemilik rumah terhindar dari kesudahan. "Kebanyakan pemilik rumah di situ kan orang-orang yang punya penghasilan pas-pasan. Kalau mereka harus menanggung rumahnya kalau roboh, bisa-bisa mereka tidak bisa membangun rumahnya karena juga harus membayar cicilan. Itu berarti mereka harus membangun dua kali," tegasnya. (kur)

JAWA POS, 22. Desember 1993